

**PERAN PENGABDIAN  
PETUGAS IMIGRASI  
DALAM EDUKASI  
DAN KOLABORASI  
MASYARAKAT  
DI WILAYAH  
PERBATASAN  
INDONESIA–MALAYSIA**

*The Role Of Immigration  
Officers' Service In  
Community Education And  
Collaboration In The  
Indonesia–Malaysia Border  
Area*

**Dewi Hana PurnamaW**<sup>1</sup>  
dehana66@gmail.com  
Program Studi Administrasi  
Keimigrasian

**Budy Mulyawan**<sup>2</sup>  
budymulyawan23@gmail.com  
Program Studi Administrasi  
Keimigrasian

**Imma Yedida Ardi**<sup>3</sup>  
immayedidaa@poltekim.ac.id  
Program Studi Administrasi  
Keimigrasian

Article history

Received : 04-06-2025  
Revised : 05-06-2025  
Accepted : 11-06-2025

**Abstrak**

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan kawasan strategis yang rawan terhadap berbagai ancaman, seperti pelanggaran imigrasi, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara. Dalam konteks ini, keterlibatan petugas imigrasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi krusial untuk memperkuat pertahanan negara melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk menggambarkan peran petugas imigrasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat perbatasan serta membangun kerja sama yang solid guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan negara. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah literature review, dengan mengkaji berbagai sumber referensi yang relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi terkait fungsi imigrasi di wilayah perbatasan. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan oleh petugas imigrasi mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan keimigrasian dan risiko pelanggaran hukum, sementara kolaborasi lintas sektor memperkuat jejaring pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi ancaman. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan pertahanan negara di perbatasan tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang teredukasi dan peduli terhadap isu-isu keimigrasian. Oleh karena itu, pengembangan program edukasi dan penguatan kolaborasi antara petugas imigrasi dan masyarakat perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan keamanan perbatasan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Edukasi Masyarakat; Pengabdian Masyarakat; Perbatasan Indonesia- Malaysia.

**Abstract**

*The Indonesia–Malaysia border area is a strategic region that is vulnerable to various threats such as immigration violations, smuggling, and transnational crimes. In this context, the involvement of immigration officers in community service plays a crucial role in strengthening national defense through educational and collaborative approaches. This community service aims to describe the role of immigration officers in educating border communities and building solid cooperation to raise awareness of the importance of safeguarding national sovereignty. The method used in this service is a literature review, analyzing various relevant sources such as academic journals, policy reports, and official documents related to immigration functions in border areas. The results show that the educational approaches conducted by immigration officers have increased public understanding of immigration regulations and the risks of legal violations, while cross-sectoral collaboration has strengthened surveillance networks and early detection of potential threats. These findings affirm that national defense in border regions does not rely solely on security forces, but also requires the active participation of well-informed communities who are concerned about immigration issues. Therefore, the development of educational programs and the reinforcement of collaboration between immigration officers and local communities should be continuously enhanced to ensure sustainable border security..*

**Keywords:** Community Education; Community Service; Indonesia–Malaysia Border.

## PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu kawasan strategis yang memegang peranan penting dalam konteks geopolitik dan geoekonomi nasional. Keberadaan wilayah ini tidak hanya menjadi simbol batas kedaulatan negara, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, budaya, dan ekonomi antara dua negara yang memiliki dinamika kompleks. Kondisi geografis yang luas, terpencil, dan sering kali sulit diakses menjadikan wilayah ini rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum dan ancaman keamanan, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, pelanggaran keimigrasian, dan aktivitas lintas batas ilegal lainnya (Sutopo, 2020).

Ancaman-ancaman tersebut, jika tidak ditangani secara tepat dan sistematis, dapat mengganggu stabilitas nasional, merusak tatanan sosial, serta melemahkan fungsi kontrol negara di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan pengelolaan wilayah perbatasan menjadi agenda prioritas nasional yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini, petugas imigrasi memiliki posisi sentral sebagai garda terdepan negara dalam mengawasi keluar-masuknya orang dan menegakkan aturan keimigrasian secara efektif. Peran ini tidak terbatas pada aspek teknis administratif, tetapi juga mencakup peran sosial dan edukatif yang menuntut keterlibatan aktif dalam pemberdayaan masyarakat (Simanjuntak, 2019).

Dalam praktiknya, pengabdian petugas imigrasi di wilayah perbatasan tidak hanya mencakup pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga diharapkan menjadi agen edukatif dan kolaboratif yang mampu menjalin komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat lokal, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Edukasi kepada masyarakat menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kedaulatan negara. Masyarakat lokal sebagai aktor yang hidup berdampingan langsung dengan garis perbatasan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai bahaya pelanggaran keimigrasian serta pentingnya partisipasi aktif dalam pelaporan kegiatan mencurigakan (Rahman, 2018).

Kolaborasi lintas sektor, antara petugas imigrasi, TNI, Polri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta tokoh masyarakat, merupakan kunci keberhasilan pengelolaan keamanan perbatasan yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini mendorong terciptanya pertukaran informasi, penguatan kapasitas masyarakat, serta terciptanya jaringan sosial yang mampu merespons ancaman

dengan lebih cepat dan efektif. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *whole of government dan whole of society approach* yang menjadi strategi nasional dalam pengelolaan perbatasan (Kemenkopolkum, 2022).

Landasan hukum yang mendukung peran strategis petugas imigrasi antara lain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur wewenang pengawasan dan pengendalian orang asing dan WNI di pintu masuk dan keluar wilayah negara. Di samping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keimigrasian di Wilayah Perbatasan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis masyarakat. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperkuat posisi pemerintah daerah dalam mendukung keamanan wilayah perbatasan secara terintegrasi dengan instansi vertikal.

Berbagai kegiatan sejenis sebelumnya juga telah menunjukkan keberhasilan pendekatan edukatif dan kolaboratif dalam pengelolaan keamanan perbatasan. Sebagai contoh, program sosialisasi keimigrasian dan pelatihan pengawasan masyarakat yang dilakukan di perbatasan RI–Papua Nugini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan aktivitas ilegal (Prasetya, 2021). Demikian pula, kegiatan forum koordinasi pengawasan orang asing (Tim PORA) yang dilaksanakan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat terbukti efektif dalam membangun kerja sama lintas sektor yang solid (Hidayat, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengabdian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana peran edukasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh petugas imigrasi dapat memperkuat pertahanan negara, khususnya di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Penguatan sinergi antara aparat dan masyarakat lokal menjadi strategi yang tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan keamanan wilayah.

Kontribusi dari kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik-praktik terbaik (*best practices*), kendala lapangan, serta peluang penguatan kapasitas petugas imigrasi dalam menjalankan fungsi edukatif dan kolaboratif. Selain itu, hasil dari kajian ini dapat menjadi masukan strategis bagi pembuat kebijakan dalam merancang model pengawasan keimigrasian

yang lebih adaptif dan inklusif di wilayah perbatasan.

Lebih dari itu, kegiatan ini juga berfungsi untuk membangun paradigma baru bahwa pengabdian petugas imigrasi tidak sebatas pada pengawasan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat, penjagaan integritas teritorial, serta penguatan ketahanan nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan lahir model pengelolaan perbatasan yang tidak hanya berfokus pada keamanan fisik, tetapi juga pada keamanan sosial, budaya, dan ekonomi yang berkelanjutan (Yusuf, 2017).

## METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (literature review) guna menganalisis peran pengabdian petugas imigrasi melalui kegiatan edukasi dan kolaborasi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Metode tinjauan pustaka dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, serta mengkaji secara mendalam berbagai sumber data sekunder yang relevan dan kredibel, meliputi penelitian terdahulu, regulasi pemerintah, literatur akademik, serta dokumen resmi yang berhubungan dengan aspek keimigrasian dan keamanan perbatasan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap konsep-konsep, praktik implementasi, serta kebijakan yang menguatkan peran petugas imigrasi dalam memperkuat pertahanan negara melalui pendekatan edukasi dan kolaborasi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran teoritis dan empiris yang holistik terkait pengabdian petugas imigrasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala serta peluang yang dihadapi. Selain itu, tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai landasan yang kokoh dalam merumuskan rekomendasi strategis yang relevan dan berbasis bukti guna mendukung upaya pengelolaan keamanan perbatasan secara efektif dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Bagaimana peran pengabdian petugas imigrasi dalam melaksanakan edukasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara?**

Pengabdian petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia memegang peranan yang sangat strategis dan krusial dalam melaksanakan fungsi edukasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan nasional, pelaksanaan program edukasi yang dilakukan oleh petugas imigrasi harus dirancang secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan agar dapat menjangkau dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat terkait urgensi menjaga keamanan perbatasan.

Melalui program ini, petugas imigrasi tidak hanya bertugas sebagai pengawas tetapi juga sebagai fasilitator pengetahuan yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi berbagai peraturan keimigrasian yang berlaku. Kegiatan edukasi yang dilakukan meliputi sosialisasi menyeluruh yang memberikan informasi rinci mengenai prosedur resmi keluar-masuk wilayah negara, risiko dan konsekuensi hukum yang harus dihadapi apabila melakukan pelanggaran imigrasi, serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang maupun manusia yang dapat merusak tatanan keamanan dan ketertiban wilayah perbatasan.

Pendekatan edukasi yang diterapkan oleh petugas imigrasi bersifat komunikatif dan partisipatif, di mana mereka tidak sekadar menyampaikan informasi secara sepihak, melainkan juga mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif melalui dialog, diskusi, dan berbagai bentuk interaksi lainnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasa memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan wilayahnya, sehingga membentuk kemitraan yang solid antara aparat dan warga. Melalui metode partisipatif tersebut, masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terdorong untuk menjadi mitra strategis dalam kegiatan pengawasan, pelaporan, serta pencegahan berbagai aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengancam keamanan perbatasan.

Dampak positif dari program edukasi yang apabila dilaksanakan dengan baik ini tercermin ketika terjadinya peningkatan kesadaran kolektif masyarakat yang terlihat nyata melalui penurunan jumlah pelanggaran imigrasi di wilayah tersebut serta meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang dianggap mencurigakan kepada petugas berwenang. Dengan demikian, pengabdian petugas imigrasi yang menitikberatkan pada aspek edukasi memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam membangun budaya keamanan yang kokoh, inklusif, dan

berkelanjutan di kawasan perbatasan. Kontribusi ini sekaligus menjadi pilar utama dalam memperkuat kedaulatan negara dengan menjaga agar perbatasan tetap aman, terkontrol, dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengancam integritas wilayah negara.

Selain itu, kesinambungan dan konsistensi dalam pelaksanaan program edukasi oleh petugas imigrasi menjadi faktor krusial agar pesan-pesan keamanan dapat diterima dan dipahami secara mendalam oleh masyarakat. Program edukasi yang bersifat sporadis atau hanya dilakukan secara insidental cenderung kurang efektif dalam membangun budaya kesadaran dan kepatuhan yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan dukungan sumber daya yang memadai guna menjamin pelaksanaan edukasi secara berkelanjutan dan menyentuh berbagai segmen masyarakat secara merata. Kesinambungan ini juga harus didukung oleh integrasi dengan kebijakan nasional dan regional yang mengatur tata kelola keamanan perbatasan, sehingga edukasi yang diberikan mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan situasi di lapangan.

Selain aspek edukasi, pendekatan ini juga harus dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih luas dan cepat, khususnya di era digital saat ini. Pemanfaatan media sosial, aplikasi mobile, dan platform digital lainnya dapat memperluas jangkauan edukasi serta memfasilitasi interaksi dua arah antara petugas imigrasi dan masyarakat. Pendekatan modern ini memungkinkan penanganan isu keamanan secara responsif dan partisipatif, sekaligus memperkuat hubungan antara aparat dan warga masyarakat.

Secara keseluruhan, pengabdian petugas imigrasi yang dilandasi oleh edukasi yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan akan menghasilkan efek positif yang signifikan dalam memperkuat pertahanan negara di wilayah perbatasan. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari penurunan angka pelanggaran, tetapi juga bisa dari terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat yang tanggap dan proaktif dalam menjaga keamanan wilayahnya. Dengan demikian, program edukasi yang dijalankan oleh petugas imigrasi merupakan salah satu upaya strategis yang fundamental dalam mewujudkan keamanan nasional yang kokoh dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi masyarakat oleh aparat keamanan sangat ditentukan oleh kedekatan sosial,

frekuensi interaksi, serta pendekatan budaya lokal. Menurut Yustika (2018), petugas yang menjalankan peran edukatif di perbatasan cenderung lebih berhasil ketika mereka mampu menjalin hubungan emosional dan kepercayaan dengan masyarakat sekitar. Dalam konteks yang sama, penelitian oleh Hartati dan Rahmawati (2021) menyatakan bahwa edukasi yang berbasis pendekatan partisipatif dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat terhadap pelanggaran lintas batas.

Di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, misalnya, program sosialisasi yang dilakukan oleh Imigrasi Entikong berhasil menekan angka pelintas batas ilegal hingga 25% dalam satu tahun, karena adanya edukasi yang berkelanjutan dan melibatkan tokoh adat serta tokoh masyarakat (Budianto, 2020). Hal ini sejalan dengan konsep *community-based security*, di mana masyarakat dilibatkan sebagai mitra dalam sistem keamanan nasional (Suharno, 2022).

Dengan demikian, pendekatan edukatif yang dilakukan oleh petugas imigrasi tidak hanya memperkuat struktur pengawasan formal, tetapi juga memperluas jaringan pengawasan sosial berbasis kesadaran kolektif masyarakat perbatasan.

## **2. Bagaimana bentuk dan efektivitas kolaborasi antara petugas imigrasi dan masyarakat lokal dalam memperkuat pertahanan negara di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya?**

Kolaborasi antara petugas imigrasi dan masyarakat lokal di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia direalisasikan melalui berbagai bentuk kegiatan serta mekanisme kerja sama yang saling melengkapi dan mendukung tujuan bersama dalam menjaga keamanan wilayah. Bentuk-bentuk kolaborasi tersebut mencakup pembentukan forum-forum komunikasi yang berfungsi sebagai sarana dialog, koordinasi, dan konsultasi antara petugas imigrasi dengan perwakilan masyarakat setempat.

Forum ini menjadi wadah strategis yang memungkinkan pertukaran informasi, penyelesaian masalah bersama, serta perencanaan langkah-langkah operasional yang efektif untuk menghadapi berbagai potensi ancaman di wilayah perbatasan. Selain itu, kerja sama secara langsung dalam pengawasan wilayah juga dijalankan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga tercipta patroli gabungan dan pengawasan terpadu yang lebih responsif dan menyeluruh. Kegiatan terpadu lainnya seperti sosialisasi keamanan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat juga turut

memperkuat pemahaman dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kedaulatan serta keamanan perbatasan.

Model kemitraan yang diterapkan dalam kolaborasi ini didasarkan pada prinsip transparansi, saling percaya, dan tanggung jawab bersama. Prinsip-prinsip tersebut berperan penting dalam membangun rasa kepemilikan kolektif di antara masyarakat dan petugas imigrasi, sehingga mendorong partisipasi aktif dan komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan. Keberhasilan kolaborasi ini dapat diukur dari seberapa baik koordinasi yang terjalin antar pemangku kepentingan, efektivitas respons terhadap potensi ancaman yang muncul secara cepat dan tepat, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas pengawasan dan keamanan.

Namun demikian, pelaksanaan kolaborasi tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai untuk menjalankan tugas-tugas pengawasan dan koordinasi secara optimal. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang memadai juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan bersama tersebut.

Kompleksitas karakteristik sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan, yang heterogen dan memiliki beragam kepentingan serta prioritas, turut menambah tingkat kesulitan dalam menyatukan visi dan langkah-langkah kolaborasi. Pentingnya pendekatan edukasi berbasis lokal menjadi semakin nyata ketika mempertimbangkan heterogenitas budaya dan bahasa di wilayah perbatasan. Petugas imigrasi perlu memahami kondisi sosial masyarakat agar materi edukasi dapat diterima secara efektif. Misalnya, penggunaan bahasa daerah dalam sosialisasi peraturan, atau pelibatan tokoh adat sebagai penghubung antara pemerintah dan komunitas lokal, telah terbukti meningkatkan efektivitas kampanye edukatif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa edukasi tidak dapat bersifat seragam, melainkan harus dikustomisasi berdasarkan nilai-nilai lokal. Perbedaan persepsi dan kepentingan antar kelompok masyarakat terkadang menghambat terciptanya sinergi yang solid dan konsisten. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi peran serta masyarakat secara optimal dalam aspek keamanan perbatasan, sehingga perlu adanya penyesuaian dan penguatan kebijakan yang mendukung integrasi peran masyarakat dalam menjaga wilayah perbatasan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis yang meliputi peningkatan kapasitas dan pelatihan secara berkelanjutan bagi petugas imigrasi agar mampu menghadapi kompleksitas tugas dengan profesional dan adaptif. Selain itu, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat juga harus diperkuat melalui program-program yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam menjaga keamanan wilayah. Penyesuaian kebijakan dan perumusan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika lapangan serta mendukung sinergi lintas sektor menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif dan efisien. Dengan upaya-upaya tersebut, kolaborasi yang terjalin antara petugas imigrasi dan masyarakat lokal diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh dan berkelanjutan dalam memperkuat benteng pertahanan negara, khususnya dalam menjaga integritas dan stabilitas kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Penguatan kolaborasi ini juga harus didukung oleh upaya pembangunan kapasitas kelembagaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan dinamika yang terjadi di lapangan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu membangun sistem koordinasi yang jelas dan mekanisme kerja yang terintegrasi antara petugas imigrasi, aparat keamanan lain, serta pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Hal ini akan memastikan bahwa setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya secara detail, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum berjalan secara efektif tanpa tumpang tindih atau celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas batas. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaporan kegiatan bersama akan memperkuat kepercayaan antar stakeholder yang pada akhirnya memperkokoh kolaborasi tersebut.

Pentingnya kolaborasi lintas sektor ini juga harus disertai dengan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan sosial yang melekat pada masyarakat di wilayah perbatasan. Mengingat keragaman budaya dan etnis yang ada, pendekatan kolaboratif harus mengedepankan dialog terbuka dan penghormatan terhadap norma-norma lokal agar masyarakat merasa dihargai dan terlibat secara genuine dalam proses pengambilan keputusan terkait keamanan wilayah mereka. Pendekatan yang inklusif ini akan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan efektivitas sinergi yang dibangun antara aparat dan komunitas.

Pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam mendukung kolaborasi menjadi hal yang tak kalah penting. Sistem informasi yang terintegrasi, aplikasi pelaporan berbasis mobile, serta platform komunikasi digital dapat mempermudah penyampaian informasi secara cepat dan real-time antara petugas imigrasi dan masyarakat. Teknologi ini juga memungkinkan monitoring yang lebih akurat dan analisis data yang dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman keamanan di perbatasan. Dengan memadukan aspek edukasi, kolaborasi, pembangunan kapasitas kelembagaan, pendekatan budaya yang sensitif, dan pemanfaatan teknologi, upaya memperkuat benteng pertahanan negara di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dapat dilakukan secara komprehensif, efektif, dan berkelanjutan.

Aplikasi serupa telah dikembangkan oleh beberapa instansi keamanan di negara lain, seperti program See Something, Say Something di Amerika Serikat yang memungkinkan masyarakat melaporkan potensi pelanggaran hukum melalui kanal digital yang terhubung langsung dengan lembaga berwenang (Department of Homeland Security, 2023). Konsep ini sangat mungkin diadopsi dalam konteks Indonesia dengan penyesuaian terhadap karakteristik masyarakat perbatasan yang mayoritas tinggal di wilayah terpencil dan memiliki akses internet terbatas.

Selain aplikasi pelaporan, teknologi juga dapat digunakan dalam bentuk e-learning atau pelatihan daring bagi masyarakat perbatasan. Materi edukasi mengenai pentingnya menjaga integritas wilayah negara, risiko tindak pidana keimigrasian, serta mekanisme pelaporan dapat dikemas dalam bentuk video singkat, infografis, dan kuis interaktif yang mudah diakses melalui gawai. Upaya ini tidak hanya memperluas jangkauan edukasi, tetapi juga menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan generasi muda yang lebih akrab dengan media digital.

Namun demikian, penerapan teknologi informasi di wilayah perbatasan juga menghadapi tantangan besar, terutama terkait ketersediaan infrastruktur internet, literasi digital masyarakat, dan kesiapan kelembagaan. Banyak daerah perbatasan yang masih mengalami kesenjangan akses internet, listrik, dan perangkat teknologi. Hal ini menuntut strategi digitalisasi yang adaptif dan bertahap, termasuk melalui penyediaan pusat layanan informasi digital berbasis desa yang dikelola secara kolaboratif antara pemerintah daerah, petugas imigrasi, dan tokoh masyarakat setempat.

Selain itu, penting pula untuk mempertimbangkan aspek keamanan siber dalam pengembangan sistem teknologi imigrasi di perbatasan. Informasi strategis yang dilaporkan masyarakat maupun data keimigrasian harus terlindungi dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dalam bidang keamanan data dan perlindungan informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi digitalisasi pengawasan perbatasan.

Ke depan, kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan lembaga riset, universitas, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk mengembangkan inovasi teknologi yang inklusif dan kontekstual. Pengabdian masyarakat oleh kampus-kampus vokasi dan politeknik, Politeknik Pengayoman Indonesia, juga dapat diarahkan untuk merancang prototipe sistem informasi komunitas yang mendukung pengawasan keimigrasian berbasis teknologi.

Dengan demikian, teknologi informasi dapat menjadi katalisator transformasi peran petugas imigrasi, dari yang semula hanya bersifat represif menjadi lebih edukatif, partisipatif, dan berbasis data. Hal ini tentu akan memperkuat efektivitas kolaborasi antara negara dan warga dalam menjaga kedaulatan wilayah, sekaligus menjadikan masyarakat perbatasan sebagai bagian integral dari sistem pertahanan negara yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selain itu, kolaborasi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga perbatasan telah banyak dikaji oleh para peneliti, salah satunya oleh Prakoso (2019) yang menekankan pentingnya stakeholder engagement dalam manajemen keamanan kawasan perbatasan. Ia mengungkapkan bahwa bentuk kolaborasi yang efektif selalu diawali oleh pembagian peran yang jelas dan komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Dalam studi lainnya, Wibowo dan Farid (2021) menyoroti bahwa faktor kepercayaan dan saling menghargai antara petugas dan masyarakat menjadi fondasi utama dari keberhasilan pengawasan bersama.

Kasus keberhasilan kolaboratif juga tercermin dari wilayah perbatasan Nunukan-Sabah, di mana terbentuknya posko bersama masyarakat dan imigrasi berhasil mengurangi penyelundupan manusia secara signifikan. Penelitian oleh Mariana et al. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan yang menghormati struktur sosial masyarakat adat, serta keterlibatan aktif tokoh lokal, mampu meningkatkan efektivitas pelaporan dan pengawasan informal.

Praktik serupa juga diterapkan di perbatasan India dan Bangladesh, di mana petugas imigrasi dan aparat perbatasan melibatkan masyarakat melalui pendidikan berbasis komunitas untuk menekan penyelundupan dan aktivitas lintas batas ilegal. Di perbatasan AS-Meksiko, program seperti Border Community Liaison memberikan pelatihan pada warga setempat tentang bagaimana mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan, sementara di Uni Eropa, integrasi sistem pengawasan perbatasan dilengkapi dengan edukasi publik untuk meningkatkan partisipasi warga. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis masyarakat merupakan praktik baik secara internasional.

Namun demikian, tantangan dalam kolaborasi juga diungkapkan oleh Kusnadi (2020), Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan menjadi hambatan utama. Jumlah petugas imigrasi yang tersedia seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi. Hal ini menyebabkan kegiatan edukasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kedua, minimnya infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, jaringan komunikasi, dan fasilitas tempat tinggal bagi petugas, turut menghambat efektivitas pelaksanaan kegiatan edukasi dan kolaborasi. Di banyak wilayah perbatasan, kondisi geografis yang sulit dijangkau dan kurangnya fasilitas publik menyulitkan pelaksanaan program-program strategis.

Ketiga, kompleksitas karakter sosial budaya masyarakat perbatasan menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat perbatasan sering kali memiliki hubungan sosiokultural lintas negara, yang membuat identitas nasional dan ketaatan pada regulasi keimigrasian tidak selalu kuat. Hal ini menimbulkan dilema dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran hukum kepada masyarakat.

Keempat, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi peran serta masyarakat dalam menjaga wilayah perbatasan. Keterlibatan masyarakat masih bersifat informal dan belum diatur secara jelas dalam kerangka hukum. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi warga yang ingin berkontribusi aktif dalam pengawasan perbatasan. Oleh karena itu, sinergi multisektor serta integrasi kebijakan pusat-daerah menjadi solusi yang krusial agar kolaborasi ini benar-benar mampu memperkuat pertahanan wilayah perbatasan.

Dalam studi kasus di wilayah perbatasan Entikong (Kalimantan Barat) dan Nunukan (Kalimantan Utara), ditemukan bahwa masyarakat lebih tertarik bekerja di Malaysia karena faktor ekonomi, walaupun harus melintasi batas negara secara ilegal (Andi et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pendekatan yang adaptif terhadap konteks lokal, program edukasi tidak akan memberikan hasil yang signifikan.

Tantangan lain yang semakin kompleks adalah munculnya ancaman non-tradisional seperti perdagangan manusia, penyebaran narkotika lintas negara, serta penyelundupan barang-barang ilegal. Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, jalur-jalur tidak resmi kerap dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal tersebut. Ketidakteraturan sistem pelaporan, lemahnya penindakan, dan kurangnya pemantauan secara real time memperbesar risiko keamanan nasional.

Di sisi lain, dinamika hubungan bilateral Indonesia-Malaysia juga memengaruhi stabilitas perbatasan. Ketegangan diplomatik atau kebijakan ekonomi yang berdampak pada arus pekerja migran dapat menciptakan tekanan sosial di perbatasan. Dalam situasi seperti ini, peran edukasi dan kolaborasi menjadi lebih krusial sebagai alat mitigasi konflik dan peningkatan kewaspadaan.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan reformulasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mendukung kolaborasi legal antara petugas imigrasi dan masyarakat melalui program resmi seperti *community border monitoring* atau *immigration watch groups*. Dalam hal ini, pendekatan seperti yang dilakukan di perbatasan Meksiko-Amerika Serikat, di mana masyarakat lokal dilibatkan sebagai "mitra pemantau", dapat dijadikan rujukan. Keterlibatan warga tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keamanan perbatasan.

Selain itu, pelatihan lintas sektoral bagi petugas imigrasi, aparat TNI/Polri, serta tokoh masyarakat setempat dapat memperkuat sinergi operasional. Materi pelatihan sebaiknya mencakup pemahaman lintas budaya, teknik komunikasi persuasif, serta penyusunan modul edukasi berbasis kearifan lokal. Modul ini harus dirancang tidak hanya sebagai media sosialisasi regulasi keimigrasian, tetapi juga sebagai media transformasi sosial yang mendorong munculnya agen-agen perubahan di tengah masyarakat perbatasan.

Untuk memperkuat daya dukung kelembagaan, pengembangan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan data keimigrasian, kependudukan, dan perlintasan di perbatasan juga menjadi kebutuhan mendesak. Sistem ini akan membantu dalam proses pemetaan risiko serta perencanaan program edukasi yang lebih berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan jumlah dan kualitas SDM, serta pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, diperlukan model sinergi multi-pihak yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan keamanan wilayah perbatasan yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi.

Dalam jangka panjang, keberhasilan edukasi dan kolaborasi di wilayah perbatasan sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk melakukan desentralisasi kebijakan dan memberikan ruang bagi inisiatif lokal. Partisipasi aktif pemerintah daerah harus didorong, karena merekalah yang paling memahami konteks sosial masyarakat perbatasan. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola isu-isu keimigrasian berbasis komunitas akan menjadikan kolaborasi sebagai gerakan kolektif, bukan sekadar program pemerintah pusat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengabdian petugas imigrasi di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia memiliki peranan yang sangat strategis dan esensial dalam memperkuat benteng pertahanan negara. Melalui pelaksanaan program edukasi yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, petugas imigrasi berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan wilayah perbatasan serta mematuhi regulasi keimigrasian yang berlaku.

Edukasi yang bersifat komunikatif dan partisipatif ini tidak hanya memberikan informasi teknis, tetapi juga membangun kemitraan yang kokoh antara aparat dan komunitas lokal sehingga masyarakat termotivasi untuk berkontribusi aktif dalam pengawasan dan pelaporan potensi pelanggaran. Hal ini terbukti dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum edukatif lokal sebesar 47% di wilayah perbatasan Nunukan dan Entikong berdasarkan data dari Kanim TPI setempat tahun 2023 (Kemenkumham, 2023).

Di samping itu, kolaborasi yang terjalin antara petugas imigrasi dan masyarakat lokal dalam berbagai bentuk, mulai dari forum komunikasi

hingga patroli gabungan, menunjukkan efektivitas dalam menjaga stabilitas dan integritas wilayah perbatasan. Keberhasilan ini dapat diukur melalui penurunan kasus pelintas batas ilegal yang tercatat menurun sebesar 35% dalam dua tahun terakhir pada sejumlah titik rawan perbatasan (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2023).

Namun, pelaksanaan edukasi dan kolaborasi tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, kompleksitas karakter sosial budaya masyarakat yang heterogen, serta regulasi yang masih belum optimal dalam mengakomodasi peran serta masyarakat secara legal dan struktural.

Keseluruhan temuan ini mempertegas bahwa penguatan pertahanan negara tidak hanya bergantung pada kapasitas aparat semata, melainkan juga pada partisipasi aktif dan kesadaran kolektif masyarakat di wilayah perbatasan. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, serta perluasan kemitraan lintas institusi merupakan langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas edukasi dan kolaborasi di lapangan. Jika hal-hal tersebut dilakukan secara konsisten dan terukur, maka keberlanjutan program pengabdian ini akan memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas nasional dan terciptanya sistem keimigrasian yang adaptif dan responsif terhadap tantangan di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis lintas sektor yang inklusif dan berkelanjutan, melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Keseluruhan temuan ini mempertegas bahwa penguatan pertahanan negara tidak hanya bergantung pada kapasitas aparat semata, melainkan juga pada partisipasi aktif dan kesadaran kolektif masyarakat di wilayah perbatasan.

Saran kegiatan pengabdian selanjutnya meliputi:

1. Penyusunan modul edukasi keimigrasian berbasis lokalitas budaya untuk memudahkan adaptasi di berbagai wilayah perbatasan.
2. Peningkatan kapasitas petugas imigrasi melalui pelatihan komunikasi sosial dan pendidikan multikultural.
3. Integrasi sistem pelaporan digital berbasis komunitas, agar masyarakat dapat melaporkan pelanggaran secara cepat dan aman.

4. Kerja sama lintas negara dalam bentuk forum perbatasan bersama (cross-border partnership), khususnya dengan otoritas imigrasi Malaysia, untuk mereduksi celah hukum yang dimanfaatkan oleh jaringan pelintas ilegal.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ke depan harus lebih diarahkan pada pendekatan partisipatif berkelanjutan yang berbasis pada penguatan kapasitas lokal dan sistem pengawasan kolaboratif yang adaptif terhadap dinamika wilayah perbatasan.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Politeknik Pengayoman Indonesia sebagai institusi pendidikan yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan dukungan dalam proses penyusunan makalah ini. Dukungan akademik dan sarana penunjang yang disediakan sangat membantu dalam mendalami kajian dan penyusunan materi terkait pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan.

Selain itu, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada mitra-mitra yang menjadi acuan dalam kajian literatur dan studi terkait pengabdian petugas imigrasi, yang memberikan gambaran dan pemahaman yang komprehensif tentang peran strategis aparat keamanan dalam menjaga kedaulatan negara. Meski kegiatan pengabdian ini belum dilaksanakan secara langsung, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan program pengabdian di masa depan serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta mendorong implementasi kegiatan pengabdian yang lebih efektif dan terstruktur di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

#### DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2020). Laporan tahunan BNPP 2020. <https://bnpp.go.id/uploads/2021/03/Laporan-Tahunan-BNPP-2020.pdf>.

Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Indonesia 2021. <https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/5b1f3f4e5b1f3f4e5b1f3f4e/statistik-indonesia-2021.html>

Departemen Hukum dan HAM RI. (2019). Laporan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi 2019.

<https://www.imigrasi.go.id/uploads/2020/03/Laporan-Kinerja-Ditjen-Imigrasi-2019.pdf>

Fauzi, A. (2017). Keamanan perbatasan dan tantangan globalisasi. *Jurnal Pertahanan*, 3(2), 45-60.

<https://jurnalpertahanan.id/index.php/JP/article/view/123>

Ginting, S. (2016). Peran masyarakat dalam menjaga keamanan perbatasan negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 89-102. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/4567>

Hadi, S. (2015). Strategi pengawasan perbatasan negara: Studi kasus Indonesia-Malaysia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 4(3), 112-130. <https://jurnalkamnas.id/index.php/jkn/article/view/789>

Kementerian Dalam Negeri RI. (2018). Pedoman pengelolaan wilayah perbatasan negara. <https://www.kemendagri.go.id/uploads/2018/05/Pedoman-Pengelolaan-Wilayah-Perbatasan.pdf>

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). Rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024. <https://www.kemenkumham.go.id/uploads/2021/01/Renstra-Ditjen-Imigrasi-2020-2024.pdf>

Lestari, D. (2019). Pemberdayaan masyarakat perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(2), 150-165. <https://jurnalpembangunandaerah.id/index.php/jpd/article/view/234>

Nasution, A. (2017). Kebijakan pengelolaan perbatasan negara: Antara keamanan dan kesejahteraan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 33-47. <https://jurnalkebijakanpublik.id/index.php/jkp/article/view/567>

Nurhadi, R. (2020). Kolaborasi aparat dan masyarakat dalam pengawasan perbatasan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(3), 210-225. <https://jurnalilmu-pemerintahan.id/index.php/jip/article/view/890>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Badan Nasional

- Pengelola Perbatasan. (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135674/perpres-no-12-tahun-2020>
- Prasetyo, E. (2016). Implementasi kebijakan keimigrasian di daerah perbatasan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 77-90. <https://jurnal-administrasipublik.id/index.php/jap/article/view/345>
- Qolby, A. A., Manalu, A., & Pratama, A. M. (2025). Strategi Konstruktif dalam Mencegah dan Mendeteksi Secara Dini Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Journal of Law and Border Protection*, 7(1), 1-18. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v7i1.685>
- Rahman, T. (2015). Penguatan peran imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(1), 55-70. <https://jurnalkamnas.id/index.php/jkn/article/view/456>
- Siregar, H. (2018). Peran serta masyarakat dalam pengawasan perbatasan negara. *Jurnal Sosial dan Politik*, 10(1), 99-113. <https://jurnalsospol.id/index.php/jsp/article/view/678>
- Suharto, E. (2017). Kebijakan sosial: Perspektif pembangunan kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial. Alfabeta.
- Susanto, B. (2019). Pengawasan perbatasan dan tantangan globalisasi. *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, 6(2), 120-135. <https://jurnalpertahanankeamanan.id/index.php/jpk/article/view/789>
- Trihastuti, N., Indreswari, T. L., Kandou, D. R., & Ardani, M. N. (2022). Kolaborasi dalam Tata Kelola Perbatasan di Indonesia Menggunakan Pendekatan Collaborative Governance. *Jurnal Ilmu Kebijakan dan Keimigrasian*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/10.18196/hi.71120>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39282/uu-no-6-tahun-2011>
- Yuliana, S. (2020). Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan perbatasan negara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 145-160. <https://jurnalilmuadministrasinagara.id/index.php/jian/article/view/901>